

ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN DANA DESA DI KECAMATAN TOMBATU UTARA

Detje Mokosolang¹, Debby Ch. Rotinsulu², Daisy S.M. Engka³

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian antara peraturan pemerintah tentang peruntukan dana desa dengan pelaksanaannya di kecamatan Tombatu utara Kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk menganalisis kelayakan penata usahaan dana desa apakah telah sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pengelolaannya.

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang bersifat multidimensi serta melibatkan semua aspek yang mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam pelaksanaannya kegiatan pembangunan dapat didekati secara regional, yaitu menetapkan daerah-daerah atau wilayah pertumbuhan ekonomi, sedangkan jika didekati secara sectoral adalah mengkaji dan menemukan sektor-sektor unggulan yaitu sektor dengan tingkat pertumbuhan tertinggi, memberi kontribusi terbesar dan menyerap tenaga kerja lokal terbanyak. Perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia di era kabinet kerja dilakukan secara bottom up planning diawali musrembang desa/kelurahan, kemudian musrembang kecamatan, dilanjutkan pada musrembang kabupaten/kota dan selanjutnya dilakukan musrembang provinsi puncaknya adalah musrembang nasional menggodok dan menetapkan perencanaan nasional yang aspiratif. Selanjutnya program perencanaan pembangunan nasional pembiayaannya tertuang dalam APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana pada pasal 56 ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah serta berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Adapun salah satu sumber pembiayaan pembangunan desa adalah dana desa. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan melakukan uji-uji antara lain uji t dan uji f. Hasil uji regresi linear berganda diperoleh koefisien variable penata usahaan (x_2) sebesar 0,75 artinya jika penata usahaan meningkat 1 % maka dana desa (Y) akan mengalami peningkatan 0,75. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh M Ridwan Dkk (2018) yang berjudul analisis pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Bone.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penatausahaan, Pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the suitability of government regulations regarding the allocation of village funds with their implementation in Tombatu Utara sub-district, Southeast Minahasa district, to analyze the feasibility of administering village funds whether they are in accordance with government regulations in their management.

Basically, development is a process of change that is multidimensional and involves all aspects that affect the welfare of society. In its implementation, development activities can be approached regionally, namely determining areas or areas of economic growth, whereas if approached sectorally, it is to study and find leading sectors, namely those with the highest growth rate, providing the largest contribution and absorbing the most local labor. Planning for Indonesia's economic development in the working cabinet area is carried out in bottom-up planning starting with the village / sub-district musrenbang, then the sub-district musrenbang, followed by the district / city musrenbang and then the provincial musrenbang is carried out at the peak of which is the national musrenbang formulating and determining an aspirational national planning. Furthermore, the financing of the national development planning program is contained in the APBN, provincial APBD and district / city APBD. In the management of regional finances, it is regulated in Law No. 32 of 2004 concerning regional government, where in article 56 paragraph 1 it explains that regional finance is that all regional rights and obligations can be valued in money and everything in the form of money and goods that can be used as regional property and related to rights and these obligations.

One of the sources of village development financing is village funds. According to the regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 Article 1 Paragraph (6) concerning Village Financial Management, it explains that village financial management is all activities which include planning, implementation, administration, reporting and accountability for village finances. This type of research is a quantitative descriptive study, while the data used are primary and secondary data. The analytical method used is multiple regression analysis by conducting tests including t test and f test. The result of multiple linear regression test shows that the administrative variable coefficient (x_2) is 0.75, meaning that if the manager increases 1%, the village fund (Y) will increase by 0.75. The results of this study support the research conducted by Ridwan et al (2018) entitled analysis of village fund allocation management in Bone sub-district.

Keywords: Implementation, Administration, Village Fund Management.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Dana desa yang mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola dana desa. Melalui dana desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk penerapan dana desa dan tercapainya pengelolaan dana desa, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya

dana desa dapat tercapai. Tahap pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Pemanfaatan dana desa di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara diperuntukan untuk 2 program utama yaitu: (1) program mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan (2) program meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Alokasi dana desa di Kabupaten Minahasa Tenggara telah meningkat dari tahun ke tahun. Dari sisi infrastruktur, Kabupaten Minahasa Tenggara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meskipun demikian masih banyak hal yang perlu dibenahi seiring dengan kemajuan yang dicapai. Beberapa indikator seperti Pertumbuhan Ekonomi dan kemiskinan masih memerlukan upaya untuk ditingkatkan. Merujuk pada Publikasi BPS (2019) dibandingkan dengan beberapa kabupaten/Kota lain di Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara masih termasuk dalam kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (diatas 10%) lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi dan Nasional.

Pengelolaan Dana Desa masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa. Pada tahapan perencanaan penggunaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan dana desa yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola dana desa. Pada penelitian hanya akan membahas pelaksanaan dan penatausahaan dana desa di Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti mengangkat judul “*Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Di Kecamatan Tombatu Utara*”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pelaksanaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Tombatu Utara telah sesuai dengan peraturan pemerintah ?
2. Apakah Penatausahaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Tombatu Utara telah sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan dana desa ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Tombatu Utara telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui Penatausahaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Tombatu Utara telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa.

Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya sebagai sumbang saran kepada Pemerintah lebih khusus lagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan program dana desa yang akuntabel, transparan dan partisipatif.
2. Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur, dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara pengelolaan dana desa dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana desa. Selain itu tujuan penelitian ini juga menganalisis kesesuaian antara penata usahaan dana desa diwilayah kecamatan tombatu utara dengan peraturan pemerintah tentang penata usahaan dana desa.

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sebagai masukan pengambilan kebijakan dalam mendukung otonomi daerah, khususnya bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel, tranparan dan partisipatif. Bagi Akademisi dapat memberi kontribusi dalam pengembangan literatur dan pbanding untuk penelitian selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Teori Pembangunan

Pembangunan dalam pelaksanaanya bersifat dinamis karena melibatkan berbagai aspek lintas bidang ilmu yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Sumber-sumber pembangunan adalah sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan pendanaan. Menurut Todaro pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan yang bersifat multidimensional dan melibatkan semua aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Suatu proses pembangunan sangatlah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi, dari sektor pertanian ke sektor industri, sektor jasa, dan sektor pariwisata. Pada dasarnya suatu perencanaan pembagunan yang baik haruslah menjamin keberlangsungan sumberdaya alam dan lingkunagan (sustainable devilmnt) .

Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Teori Agensi

Teori agensi menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Pada organisasi sektor publik dibangun atas dasar teori agensi. Teori agensi memandang bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai *agents* bagi masyarakat desa (*principals*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri. Hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada agent untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan agensi teori pengelolaan pemerintah desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

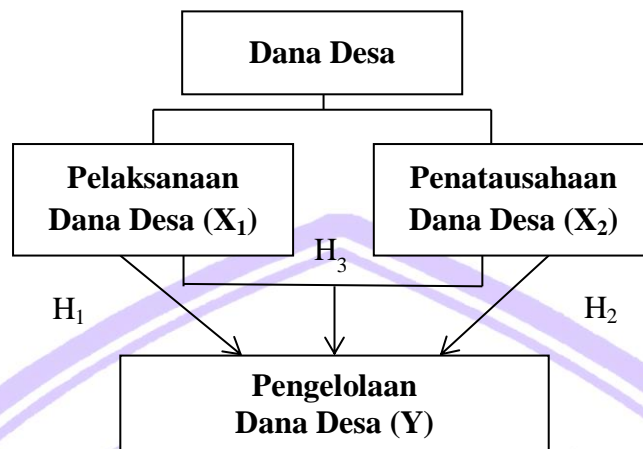
Desa

Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut, desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 12).

SIMDA Desa

SIMDA Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Sebelumnya Aplikasi ini dikembangkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di Lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Namun terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA) oleh tim yang telah ditunjuk. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi SIMDA Desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA Desa.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis tersebut baru dapat diuji kebenarannya lewat penganalisaan dan penelitian. Hipotesis ini dapat berupa hubungan positif maupun negatif, tergantung variabel yang diuji. Dalam penelitian ini penulis mengangkat hipotesis sebagai berikut:

1. H₁: Diduga Pelaksanaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.
2. H₂: Diduga Penatausahaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.
3. H₃: Diduga Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk wawancara guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak ketiga atau literatur, tulisan dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah:

- 1) Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016-2019, yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Minahasa Tenggara, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kantor Camat Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara. Dimana dari dokumen ini diperoleh data mengenai jumlah Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa-Desa dalam Lingkup Kecamatan Tombatu di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016-2019.
- 2) Tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kecamatan Tombatu Utara dengan waktu penelitian adalah tahun 2015-2019.

Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Angket/ kuesioner

Metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan tepat, lalu meminta responden untuk menjawabnya, biasanya dalam suatu form yang berisikan beberapa pertanyaan, lalu responden hanya tinggal menjawab ya/tidak,

2) Wawancara

Susan Stainback dalam Sugiyono (2015:72) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk menggali hal-hal penting dan menarik untuk diungkapkan dalam penelitian sehubungan dengan Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa di Kecamatan Tombatu Utara yang mengacuh pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, untuk pengelolaan Dana Desa. Jawaban dari informan tidak dibatasi oleh penulis sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa. Wawancara dilakukan dengan menggunakan jenis *In-depth interviews* dengan metode semi terstruktur dengan durasi waktu 30-60 menit dan menggunakan alat perekam.

3) Studi Pustaka

Studi pustaka (atau sering disebut juga studi literature-literatur *review*) merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ada berbagai jenis sumber pustaka (literatur) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pustaka, baik buku teks, surat kabar, majalah, brosur, tabloid, dan sebagainya (Martono, 2011:46).

4) Dokumentasi

Menurut Ibrahim (2015:93) dokumen atau dokumentasi dalam penelitian mempunyai 2 (dua) makna yang pertama dokumen yang dimaksudkan sebagai alat bukti tentang sesuatu, termasuk catatan-catatan, foto, rekaman video atau apapun yang dihasilkan oleh peneliti. Kedua dokumen yang berkenaan dengan peristiwa atau momen atau kegiatan yang telah lalu, yang padanya mungkin dihasilkan sebuah informasi, fakta dan data yang diinginkan dalam penelitian. Dokumen dalam penelitian ini adalah menyangkut Peraturan-peraturan, RPJMDes, APBDDes, RKPDes serta dokumen administrasi lainnya.

Adapun dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa, mereka dianggap tepat (*key person*) untuk berkontribusi dalam penelitian ini. Sedangkan untuk masyarakat yang diwakili tokoh agama, dan pendamping Dana Desa yang berhubungan dengan manfaat dari pengelolaan Dana Desa tersebut. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa, tokoh agama serta pendamping lokal desa.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek penelitian yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2003). Berdasarkan pengertian di atas, populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa Kecamatan Tombatu Utara.

Sampel

Arikunto (2006) menyatakan bahwa: “Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteiti”. Adapun desain sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Judgment sampling* atau berdasarkan pertimbangan. Dimana metode ini merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan yang umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Menurut Sugiyono (2010), pengertian *Judgement Sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya biasa lebih resperantif.

Untuk menentukan Jumlah sampel yang akan di ambil, maka di gunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$
$$n = \frac{110}{1 + 110 (0,05)^2}$$
$$= 86,2$$
$$= 86 \text{ respondent}$$

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi Operasional

Definisi operasional variabel didasarkan pada satu atau lebih refrensi yang disertai dengan alasan penggunaan definisi tersebut. Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyomo, 2010). Variabel-variabel yang diteliti adalah variabel independen yaitu Pelaksanaan Dana Desa (X_1) dan Penatausahaan Dana Desa (X_2), sedangkan variabel dependen yaitu Pengelolaan Dana Desa (Y).

Tabel 2.
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Pelaksanaan Dana Desa	Sebuah rencana yang sudah disusun secara matang untuk mendapatkan hasil atau keinginan yang di harapkan. (Tjiptono, 2005 : 82)	<ul style="list-style-type: none"> - Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. - Pelaksanaan kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang diverivikasi oleh Sekretaris Desa - Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 	Variabel Dummy
Penatausahaan Dana Desa	Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang di lakukan dan di catat dalam buku kas umum yang bersifat tunai. (Tjiptono, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. - Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 	Variabel Dummy
Pengelolaan Dana Desa	Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Dana Desa - Penatausahaan Dana Desa 	Variabel Dummy

Pengukuran Variabel

Variabel penelitian harus dapat diukur menurut skala ukuran yang lazim digunakan. Skala pengukuran yang diterapkan guna mengukur indikator-indikator pada variabel independen dan dependen di atas menggunakan Variabel Dummy. Variabel Dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif (misal: jenis kelamin, pekerjaan, ras, tingkat pendidikan, agama dan lain-lain). Variabel dummy merupakan variabel katagorikal yang diduga mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel yang bersifat kontinue. Variabel dummy hanya mempunyai 2 (dua) nilai yaitu 1 dan 0, dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk jawaban Tepat Waktu (TW) diberi nilai = 1
2. Untuk jawaban Tidak Tepat Waktu (TTW) diberi nilai = 0

Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda termasuk didalamnya koefisien korelasi determinasi berganda serta uji t dan uji F. Sebelum melakukan analisis regresi berganda tahapan yang harus dilakukan yaitu uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Karakteristik Responden

Responden adalah masyarakat Kecamatan Tombatu Utara, dimana dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan desa asal. Responden laki-laki 70% berjumlah 35 orang, responden perempuan 30% berjumlah 15 orang, selanjutnya variasi usia responden dua puluh satu sampai tiga puluh tahun 8% (4 orang), usia tiga puluh satu sampai empat puluh tahun 34% (17 orang), usia empat puluh satu sampai lima puluh tahun 42% (21 orang) dan usia lima puluh satu sampai enam puluh 16% (8 orang). Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : SMP 14% (7 orang), SMA/SMK 80% (40 orang), Diploma/Sarjana 6% (3 orang). Data responden didominasi oleh lulusan SMA/SMK sebesar 80% (40 orang). Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan desa sebagai berikut : Tombatu dua 16% (8 orang), Tombatu dua barat 20% (10 orang), Tombatu dua utara 16% (8 orang), Winorangian 22% (11 orang), Winorangian satu 12% (6 orang), Kuyanga satu 14% (7 orang). Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari 10 desa, tetapi dalam penelitian ini hanya mengambil responden dari 6 desa.

Uji Validitas

Menurut Sekaran dalam Wijaya (2013: 88) validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya, item pertanyaan dikatakan signifikan ($< 0,05$) jika total butir pertanyaan menghasilkan bintang dengan dua kemungkinan (Bawono, 2006: 76):

1. Jika berbintang satu (*) itu berarti korelasi signifikan pada level 5% (0,05) untuk dua sisi.
2. Jika berbintang dua (**) itu berarti korelasi signifikan pada level 1% (0,01) untuk dua sisi.

Tabel 7 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Pertanyaan	Total Score Correlation	Keterangan
1	Pelaksanaan (X_1)	Pelaksanaan 1	.573**	Vaild
		Pelaksanaan 2	.656**	Vaild
		Pelaksanaan 3	.689**	Vaild
		Pelaksanaan 4	.666**	Vaild
		Pelaksanaan 5	.598**	Vaild
		Pelaksanaan 6	.620**	Vaild
		Pelaksanaan 7	.674**	Vaild
2	Penatausahaan (X_2)	Penatausahaan 1	.366**	Vaild
		Penatausahaan 2	.621**	Vaild
		Penatausahaan 3	.541**	Vaild
		Penatausahaan 4	.896**	Vaild
		Penatausahaan 5	.638**	Vaild
3	Pengelolaan Dana Desa (Y)	Pengelolaan Dana Desa 1	.787**	Vaild
		Pengelolaan Dana Desa 2	.462**	Vaild
		Pengelolaan Dana Desa 3	.541**	Vaild
		Pengelolaan Dana Desa 4	.823**	Vaild
		Pengelolaan Dana Desa 5	.437**	Vaild

Sumber: Hasil Output SPSS, 2020

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yang umum digunakan adalah *Cronbach's Alpha*. Suatu model yang terdiri dari yang variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut : variable x1 pada untuk semua variabel dapat dilihat pada alfa 0,75 reliable, variable x2 0,635 reliable dan variable Y 0, 618 reliable.

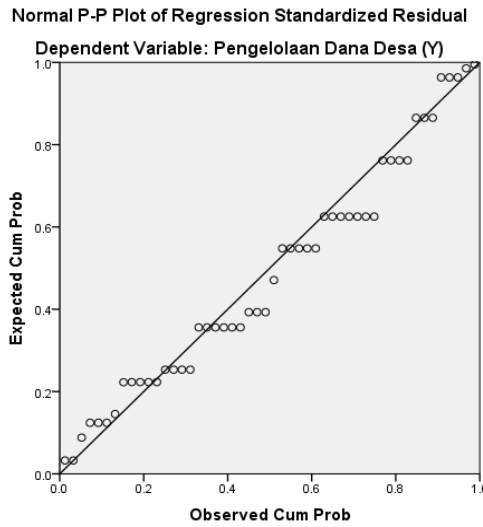
Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel sudah reliabel ditunjukkan dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Jadi dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik normal *Probability Plot*. Berikut ini

Gambar Hasil Uji Normalitas



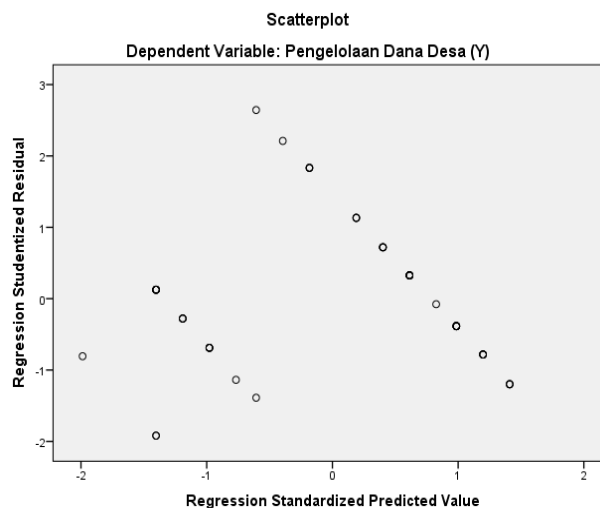
Sumber: Hasil Output SPSS, 2020

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal .

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan suatu model dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Output SPSS, 2020

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang terbentuk dengan kata lain grafik menggambarkan plot menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti variabel Harga (X_1), Modal (X_2), Luas Lahan (X_3) dan Pendidikan (X_4) terbebas dari heteroskesdastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tujuan dilakukanya uji asumsi multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen yaitu Pelaksanaan dan Penatausahaan. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pelaksanaan (X ₁)	1.000	1.000	Non-Multikolinearitas
Penatausahaan (X ₂)	1.000	1.000	Non-Multikolinearitas

Sumber: Hasil Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 9 diatas hasil uji multikolinearitas dapat dilihat tidak terjadi gejala multikolinearitas karena nilai tolerance variabel Pelaksanaan (X₁) dan Penatusahaan (X₂) > 0,10 dan nilai VIF variabel Pelaksanaan (X₁) dan Penatusahaan (X₂) < 10, hal ini berarti tidak terjadi hubungan diantara variabel-variabel independen dengan demikian, asumsi multikolinearitas terpenuhi (bebas dari multikolinearitas).

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Hasil uji regresi menunjukkan signifikan atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen baik parsial maupun simultan. Uji regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 20. Berikut hasil uji regresi untuk mengetahui pengaruh Pelaksanaan dan Penatusahaan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.840	.385		2.184	.034		
1 Pelaksanaan (X ₁)	.200	.078	.175	2.568	.013	1.000	1.000
Penatausahaan (X ₂)	.750	.059	.868	12.718	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

Sumber: Hasil Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat dibuat model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,840 + 0,200X_1 + 0,750X_2 + e$$

Yang artinya:

1. Nilai konstan sebesar 0,840 artinya jika variabel yang diteliti dalam hal ini X_1 dan X_2 konstan maka Y akan meningkat atau bertambah sebesar 0,840.
2. Nilai koefisien sebesar 0,200 artinya jika variabel yang diteliti dalam hal ini Pelaksanaan (X_1) bertambah sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Y sebesar 0,200.
3. Nilai koefisien sebesar 0,750 artinya jika variabel yang diteliti dalam hal ini Penatausahaan (X_2) bertambah sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Y sebesar 0,750.

Pengujian Hipotesis

Uji t Statistik

Uji t dikenal terhadap uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel atau terhadap melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. Rumus mencari t tabel = $(\alpha/2;n-k-1) = (0,05/2;50-2-1) = (0,025;47) = 2,014$, t tabel yang didapat yaitu 2,011.

Hipotesis:

- $H_0 = X_1-X_2$
Tidak ada pengaruh secara parsial variabel independen (Pelaksanaan dan Penatusahaan) terhadap variabel dependen (Pengelolaan Dana Desa).
- $H_a = X_1-X_2$
Ada pengaruh secara parsial variabel independen independen (Pelaksanaan dan Penatusahaan) terhadap variabel dependen (Pengelolaan Dana Desa).

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut

- Jika t hitung \geq t tabel, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima.
- Jika t hitung \leq t tabel, maka H_0 diterima, dan H_a ditolak.

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak kriterianya adalah sebagai berikut:

- Jika signifikan $\leq 0,05$ maka berpengaruh signifikan.
- Jika signifikan $\geq 0,05$ maka tidak ada pengaruh signifikan.

Tabel 11 Hasil Uji t Statistik
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.840	.385		2.184	.034		
1 Pelaksanaan (X_1)	.200	.078	.175	2.568	.013	1.000	1.000
Penatausahaan (X_2)	.750	.059	.868	12.718	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

Sumber: Hasil Output SPSS, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan dalam table 4.10 diatas diperoleh:

1. Nilai t hitung untuk variabel Pelaksanaan (X_1) sebesar 2.568 > dari nilai t tabel sebesar 2,011 dengan tingkat signifikan 0,013, karena nilai sig < 0,05 artinya variabel Pelaksanaan (X_1) secara parsial berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y). Ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak.

2. Nilai t hitung untuk variabel Penatausahaan (X_2) sebesar 12.718 > dari nilai t tabel sebesar 2,011 dengan tingkat signifikan 0,000, karena nilai sig < 0,05 artinya variabel Penatausahaan (X_2) secara parsial berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y). Ini berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Uji F Statistik

Uji F dikenal terhadap uji simultan, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung terhadap F tabel atau terhadap melihat kolom signifikansi pada F hitung. Rumus mencari F tabel = (k;n-k) = (2;50-2) = (2;48) = 3,19, F tabel yang didapat yaitu 3,19.

Hipotesis:

- $H_0 = X_1-X_2$
Tidak ada pengaruh secara simultan variabel independen (Pelaksanaan dan Penatusahaan) terhadap variabel dependen (Pengelolaan Dana Desa).
- $H_a = X_1-X_2$
Ada pengaruh secara simultan variabel independen (Pelaksanaan dan Penatusahaan) terhadap variabel dependen (Pengelolaan Dana Desa).

Pengujian Hipotesis t kriterianya sebagai berikut

- Jika F hitung \geq F tabel, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima
- Jika F hitung \leq F tabel, maka H_0 diterima, dan H_a ditolak

Dimana dalam melihat pengaruh signifikan atau tidak kriterianya adalah sebagai berikut:

- Jika signifikan \leq 0,05 maka berpengaruh signifikan
- Jika signifikan \geq 0,05 maka tidak ada pengaruh signifikan

Tabel 12 Hasil Uji F Statistik ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	43.452	2	21.726	83.920	.000 ^b
1 Residual	12.168	47	.259		
Total	55.620	49			

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Penatausahaan (X2), Pelaksanaan (X1)

Sumber: Hasil Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel 12 di atas dapat dilihat bahwa nilai F statistik yang diperoleh 83,920 > F tabel 3,19. Dengan taraf signifikan 0.000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil analisis tersebut menolak H_0 dan menerima H_a atau dengan kata lain variabel Pelaksanaan (X_1) dan Penatausahaan (X_2) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Gujarati (2012) analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase (%) pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) variabel Pelaksanaan (X_1) dan Penatausahaan (X_2) terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) dapat dilihat dalam tabel 13 dibawah ini.

Tabel 13 Hasil Koefisien Determinasi (R^2) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.884a	.781	.772	.509	2.572

a. Predictors: (Constant), Penatausahaan (X₂), Pelaksanaan (X₁)

b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber: Hasil Output SPSS, 2020

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,781 atau 78,1%, menandakan bahwa kedua variabel independent yaitu Pelaksanaan (X_1) dan Penatausahaan (X_2), memberikan pengaruh sebesar 78,1% terhadap variabel dependent yaitu Pengelolaan Dana Desa (Y). Sedangkan sisanya sebesar 21,9% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pelaksanaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dari hasil wawancara yang dilakukan, pelaksanaan dana desa telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, sumber daya manusia dari perangkat desa di Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara, masih kurang handal dan kompeten karena pembangunan desa hanya berdasarkan perkiraan saja. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan para perangkat desa yang sebagian besar hanya sampai Sekolah Menengah Atas dan juga banyak yang tidak dibekali dengan pelatihan sebelumnya.

Dari hasil uji regresi linier berganda diperoleh koefisien regresi variabel Pelaksanaan (X_1) sebesar 0,200, artinya jika Pelaksanaan meningkat 1% maka Pengelolaan Dana Desa (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,200, begitupula sebaliknya dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil perhitungan nilai t hitung sebesar 2.568 > dari nilai t tabel sebesar 2,011 dengan tingkat signifikan 0,013, karena nilai sig < 0,05 maka hipotesis H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Pelaksanaan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Khalida Shuha (2018) dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)". Pelaksanaan dana desa mendapat kritikan dari masyarakat di Nagari Lubuk Alung, bahwa dari segi perencanaan dengan musyawarah hanya formalitas saja, karena yang mengikutinya sebagian besar dilakukan oleh kerabat-kerabatnya saja. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Aie Tajun, lebih cenderung mengutamakan Korong tertentu.

Pengaruh Penatausahaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data dan hasil wawancara penatausahaan dana desa pada enam desa di Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan sesuai tugasnya Bendahara Desa dengan melakukan pencatatan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang terjadi baik berupa penerimaan maupun pengeluaran. Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran tersebut dibuat berdasarkan arus uang yang masuk dan arus uang yang keluar, serta diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulannya sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

Dari hasil uji regresi linier berganda diperoleh koefisien regresi variabel Penatausahaan (X_2) sebesar 0,750, artinya jika Penatausahaan meningkat 1% maka Pengelolaan Dana Desa (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,750, begitupula sebaliknya dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil perhitungan nilai t hitung 12.718 > dari nilai t tabel sebesar 2,011 dengan tingkat signifikan 0,000, karena nilai sig < 0,05 maka hipotesis H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan

antara Penatausahaan terhadap Pendapatan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan Tikollah, M. Yusuf dan A. Ngampo (2018) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”. Dalam penelitian ini, penatausahaan dana desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengaruh Pelaksanaan dan Penatausahaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan dan Penatausahaan pada enam desa di Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah agar dapat ditingkatkan lagi diantaranya, minimnya sumber daya manusia dari perangkat desa sehingga belum semua pekerjaan dilakukan dengan tertib administrasi. Pengelolaan Dana Desa menjadi kurang optimal dikarenakan sebagian besar dana desa direalisasikan pada pembangunan fisik dan pengadaan barang sedangkan proses Pengelolaan Dana Desa dengan rendahnya sumber daya manusia perangkat desa yang dimiliki tidak diperhitungkan sebagai hambatan. Perangkat desa seharusnya memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan tugas/tanggung jawab yang dimiliki.

Dari hasil perhitungan uji F dimana sig penelitian diperoleh 0,000, dengan sig penelitian $< 0,05$ maka hipotesis H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pelaksanaan dan Penatausahaan secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara. Kemudian dari perhitungan koefisien determinan (R^2) diketahui besarnya angka R^2 adalah 0,781 atau 78,1%, yang berarti variabel Pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan sebesar 78,1% oleh variabel Pelaksanaan dan Penatausahaan sedangkan sisanya 21,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian ini. Pelaksanaan dan Penatausahaan merupakan indikator penting dalam Pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Gresly Yunius Rainal Mamelolo, Lintje Kalangi, Linda Lambey (2016) dengan judul “Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamubagu Timur, Kota Kotamubagu. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Moyag dan Desa Kobo Kecil pada prinsipnya telah dilakukan berdasarkan regulasi. Namun belum semua pekerjaan dilakukan dengan tertib administrasi. Pelaksanaannya belum sepenuhnya mendukung asas-asas pengelolaan keuangan desa. Selain itu Pemerintah Desa belum memiliki SOP (*standard operating procedure*) terkait pelaksanaan dana desa. Ini dibutuhkan guna mendukung implementasi program dana desa. Kemudian Penatausahaan Dana Desa di Desa Moyag dan Desa Kobo Kecil pada dasarnya memiliki kemudahan, yakni dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Namun Aplikasi ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Desa dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas.

Dengan menerbitkan regulasi yang tepat terkait Pengelolaan Dana Desa serta melaksanakan bimbingan teknis bagi pengelola keuangan desa, menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki komitmen yang kuat guna mendukung akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Komitmen pimpinan sebagai bentuk dukungan sangatlah dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan dana desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Berganda pada penelitian mengenai Analisis Pendapatan Usaha Tani Salak di Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai bahwa:

1. Pelaksanaan dana desa sudah sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah, dan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Penatausahaan dana desa sudah sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah, dan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Pelaksanaan dan Penatausahaan secara bersama-sama / simultan telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara. Selanjutnya, kedua variabel independen tersebut juga sudah sangat menjelaskan peningkatan variabel dependen.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut.

1. Kepada perangkat desa, masyarakat, dan seluruh pihak yang terkait di Kecamatan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara. disarankan agar dapat lebih meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan dana desa.
2. Kepada Pemerintah di Kecamatan Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara disarankan kiranya mengangkat perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian sesuai pada bidangnya dan disarankan melaksanakan pelatihan yang memadai kepada seluruh perangkat desa terkait teknis pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Jensen, Michael C. and Clifford H. Smith Jr., eds. *The Modern Theory of Corporate Finance*. McGraw-Hill, 1984
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan RD*. Edisi Revisi XXII. Bandung : Alfabeta
- Undang Undang Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.